

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis akan menjabarkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus, memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara. Daerah Jakarta, sudah sangat berkembang dari sisi infrastruktur hingga perekonomian. Pada awal tahun 2019, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, mengumumkan bahwa ada rencana perpindahan lokasi ibu kota negara Indonesia, yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kalimantan Timur. Rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), bukanlah sesuatu yang baru, sebelumnya rencana perpindahan ini sudah menjadi perdebatan. Rencana perpindahan semakin intensif di bahas, ketika melihat daerah Jakarta khususnya Pulau Jawa, sudah tidak efektif lagi mengemban tugas dan fungsinya sebagai Ibu Kota. Bahwa pemindahan ibu kota diperlukan agar mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek yang sudah menjadi pusat perekonomian hingga menjadikan Jakarta, daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Perpindahan ibu kota, direncanakan agar mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian Timur. Selain itu, mendorong menjadi Indonesia Centris yang berawal dari Jawa Centris.
2. Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, sudah ditunjuk sebagai daerah calon Ibu Kota Negara (IKN), daerah tersebut di nilai memiliki beberapa keunggulan berbanding daerah lain di Indonesia. Keunggulan tersebut antara lain adalah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki lokasi potensial

untuk di bangun infrastruktur, ketersediaan air yang melimpah menjadi salah satu keunggulan dari kedua Kabupaten tersebut, potensi konflik sosial yang relatif rendah dengan keberagaman pendatang, menjadikan wilayah tersebut terintegritas karena tetap menjaga Kebhinekaan.

3. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur membutuhkan konsep status yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai IKN, agar mempermudah, daerah tersebut melaksanakan tanggung jawab sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah tersebut membutuhkan Penataan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Daerah IKN, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajaman Paser Utara sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibu Kota perlu dilakukan Pemekaran Daerah dengan menggabungkan bagian daerah dari Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara agar dijadikan daerah Ibu Kota Negara. Penggabungan daerah tersebut di tetapkan melalui tahapan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan pada daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting diperhatikan agar perpindahan IKN, bisa memajukan daerah hingga memajukan kesejahteraan umum.

## **5.2 Saran**

Melihat masalah-masalah diatas yang begitu kompleks dan berdampak besar pada inti dari penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN), untuk itu haruslah dilakukan beberapa pemecahan masalah tersebut, disini penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Hubungan antar susunan pemerintahan sangat penting untuk keberlangsungan integritas Ibu Kota Negara yang baru di

Kalimantan Timur. Potensi daerah dan keanekaragaman daerah, yang dimiliki Kalimantan Timur seharusnya semakin di tunjukkan dan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut, agar kekhususan yang diberikan dapat memajukan kesejahteraan umum.

2. Dibutuhkan kajian secara teoritik maupun praktik dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Agar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak banyak tumpang tindih dan saling melemahkan. Pembagian kewenangan penting agar mengetahui hak dan kewajiban dari berbagai penyelenggara pemerintahan. Khususnya untuk pengambilan keputusan sektoral yang menyangkut kepentingan umum, yang selama ini masih menjadi perdebatan di wilayah DKI Jakarta, untuk kewenangan Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat perlu ditingkatkan. Kesempatan yang diberikan untuk masyarakat dapat berpartisipasi di segala keputusan pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat yang dampaknya secara langsung maupun tidak langsung di rasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah sekiranya yang mengganggu kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah khusus.
4. Membutuhkan kesadaran serta kontribusi dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga masyarakat ingin melihat daerah Kalimantan Timur, khususnya Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara agar lebih maju lagi. Para penyelenggaran pemerintahan yang ikut dalam pelaksanaan otonomi daerah khusus diharapkan melakukan semua kebijakan dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Agar setiap masyarakat yang mengharapkan suatu perubahan yang menjadi lebih makmur bisa terealisasi dengan penyelenggaraan pemerintahan khusus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. L.N.R.I Tahun 2014 No. 244

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2015 No. 58

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

### **BUKU**

C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil. 2008. Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Abu Daud. 1990. Ilmu Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.

C.F. Strong. 2004. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introductions to the Comparative Study of Their History and Existing Form. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Ahmad Sukardja. 2012. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi dalam Perspektif Fikh Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika.

Agussalim A. Gdjong. 2007. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogot: Ghalia Indonesia.

K. Rahmanathan. 2003. Asas Sains Politik. Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

- Jimly Asshiddiqie. 2001. Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI. Jakarta: The Habibie Center.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Rusdianto Sesung. 2013. Hukum Otonomi Daerah (Negara kesatuan, Daerah Istimewa, Daerah Otonomi Khusus). Bandung: PT. RefikaAditama.
- Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Juanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Josef Mario Monteiro. 2014. Hukum Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Henry Maddick. 1996. Democracy, Decentralization and Development, reprinted London. London: Asia Publishing House.
- Yusnani Hasyimzum. 2017. Penguatan Institusional Pemekaran Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman Hakim. 2012. Filosofi Kewenangan Ordan dan Lembaga Daerah, Malang: Setara Press.
- J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hari Sabarno. 2008. (Untaian Pemikiran Otonomi Daerah) Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Edisi 1. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafik.
- Rudy. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia. Bandar Lampung: Indepth.
- Ni'matul Huda. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.
- Syarief Saleh. 1953. Otonomi dan Daerah Otonom. Jakarta: Endang.
- J. Wayong. 1957. Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah. Jakarta: Djambatan.
- Sutrisno Hadi. 1993. Metodologi Reseach II. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media Publishing, Surabaya.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2000. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-13.
- David E. Apter. 1987. Politik Modernisasi. Jakarta: Gramedia.
- Inu Kencana Syafie. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Refika Aditama.
- Charler Andrain. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- S. Pamuji. 1994. Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Ramlan Surbakti. 1992. Pemahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kamal Hidjaz. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sitem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makasar: Pustaka Refleksi.
- SF. Marbun. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Media Sarana Press.
- Juanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Josef Mario. 2014. Hukum Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Henry Maddick. 1996. Democracy, Decentralization, and Development. London: Asia Publishing House.
- Koesoemahatmadja. 2014. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI. Bandung: Nusa Media.
- Yusnani Hasyimzum. 2017. Penguatan Institusional Pemekaran Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarno. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jacobus Perviddya. 2006. Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabar Rakyat Papua di Dalam NKRI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad Sarip. 2017. Samarinda Tempo Doeloe Sejarah Lokal 1200-1999. Samarinda: RV Pustaka Horizon.
- Karsayuda. 2013. Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malang: UB Press.
- C.S.T Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tri Ratnawati. 2009. Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utara.
- Ni'matul Huda. 2006. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maria Farida. 1998. Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

#### **PUSTAKA TIDAK DIPUBLIKASI**

- Rudy. 2013. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Mukhlis. 2004. Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Bandung: Disertasi Universitas Padjajaran Bandung.
- Djojosoekarto, Agung, Rudiarto Sumarwono, dan Cucu Suryaman. 2008. Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- M. Laica Marzuki. 2006. Berjalan-Jalan di Ranah Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bagir Manan. 1990. Hubungan Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Bandung: Disertasi Universitas Padjajaran.

Faisal Akbar. 2007. Sumber-Sumber Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Otonomi Daerah. Medan: Disertasi Universitas Sumatera Utara.

Tim Penyusun (2019). *Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2019*. Penajam: Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, ISSN 1907-2120

## **JURNAL**

Mitendra, Hario Mahar, “Fenomena dalam Kekosongan Hukum”, *Jurnal RechtsVinding Online*, Hlm. 2

[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IZlyTBH5PaoJ:https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Fenomena%2520Dalam%2520Kekosongan%2520Hukum.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IZlyTBH5PaoJ:https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%2520Dalam%2520Kekosongan%2520Hukum.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d)

Nasir, Gamal Abdul, Jurnal Hukum Replik, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, Volume 5 Nomor. 2 September 2017, P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094, Hlm. 176

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OFLJfZxmFE8J:jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/download/925/590+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>

M, Makhfudz, “Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah” Jurnal Hukum Volume 3, No. 2.

<https://media.neliti.com/media/publications/53317-ID-kontroversi-pelaksanaan-otonomi-daerah.pdf>

Baharudin, “Desain daerah Khusus/ Istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi” Masalah-masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716

<https://media.neliti.com/media/publications/156798-ID-desain-daerah-khusus-istimewa-dalam-sist.pdf>

Djaenuri, Aries. 2014. “Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945”. Modul Pembelajaran IPEM4425. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. ISBN 9786023926640 / E-ISBN 9786023926671. <http://repository.ut.ac.id/4248/1/IPEM4425-M1.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2020.

## **HALAMAN INTERNET DAN SUMBER LAINNYA**

Rakhmat Nur Hakim, Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Minta Izin Ibu Kota Ke Kalimantan. Diunggah pada tanggal 16 Agustus 2019. Editor: Bayu Galih. Situs Resmi Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/10571051/sidang-bersama-dpd-dpr-jokowi-minta-izin-pindah-ibu-kota-ke-kalimantan?page=2>

Ihsanuddin, Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Diunggah pada tanggal 26 Agustus 2019. Editor: Bayu Galih. Situs Resmi Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara>

Situs Resmi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur <https://bappedakaltim.com/profil-daerah-provinsi-kalimantan-timur> diakses pada 7 Februari 2020

Situs Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur <https://dprd-kaltimprov.go.id/pages/statis/3/sejarah-dprd.html> diakses pada tanggal 26 Februari

Situs Resmi Provinsi Kalimantan Timur <https://kaltimprov.go.id/halaman/sejarah-kaltim> diakses pada tanggal 7 Februari 2020

Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. <http://kpu.portal-kaltim.com/tentang-kpu> diakses pada tanggal 9 Februari 2020

Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara <https://kukarkab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 9 Februari 2020

Situs Resmi Kabupaten Kutai Kartanegara [http://kabupaten.kutaikartanegara.com/index.php?menu=Gambaran\\_Umum](http://kabupaten.kutaikartanegara.com/index.php?menu=Gambaran_Umum) diakses pada tanggal 8 Februari 2020

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Banyaknya Kecamatan, Desa/Kelurahan. <https://kaltim.bps.go.id/statictable/2015/03/13/232/banyaknya-kecamatan-desa-kelurahan-dan-luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota-2015-.html> diakses pada 8 Februari 2020

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, Distribusi Persentase PDRB seri 2010 Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2019. <https://kukarkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/5/distribusi-persentase-pdrb-seri-2010-kabupaten-kutai-kartanegara-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2019-persen-.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2020

Situs Resmi Simprodata <http://www.simprodata.com/profile/baca/id/1> diakses pada tanggal 11 Februari 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi *online/daring*, <https://kbbi.web.id/> diunduh pada tanggal 7 Mei 2020

Lektur.ID, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi III. <https://lektur.id/sinonim-pembentukan/> diakses pada tanggal 7 Mei 2020

Situs Resmi Tribun Kaltim, Inilah 4 Kecamatan jadi Fokus Pemkab Kukar Kaltim, Persiapan Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/11/18/inilah-4-kecamatan-jadi-fokus-pemkab-kukar-kaltim-persiapan-pembangunan-ibu-kota-negara-indonesia> diakses pada tanggal 17 Mei 2020

Situs Resmi Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. Informasi dalam dokumen tersebut berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019. [https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Prolegnas-Tahun-2020-2024\\_17Des2019\\_Pemantauan-PSHK.pdf](https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Prolegnas-Tahun-2020-2024_17Des2019_Pemantauan-PSHK.pdf) diakses pada tanggal 26 April 2020

Yoga Sukmana. 2019. “Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024” <https://money.kompas.com/read/2019/05/09/184859926/kepala-bappenas-pemindahan-ibu-kota-masuk-rpjmn-2020-2024> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019

Gunawan, Abelda, Situs Resmi Liputan 6. 2019. “Ini 4 Kecamatan yang Disiapkan Penajam Paser Utara untuk Lokasi Ibu Kota Baru.” <https://www.liputan6.com/regional/read/4047144/ini-4-kecamatan-yang-disiapkan-penajam-paser-utara-untuk-lokasi-ibu-kota-baru> diakses pada tanggal 17 Mei 2020

